

# KESADARAN AKAN KERAGAMAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN JENIS PRAKSIS PENDIDIKAN<sup>1</sup>

Oleh Edi Subkhan<sup>2</sup>

## Hegemoni Sekolah

Adakah yang amat sangat istimewa dari sekolah? Hampir tiap pertemuan keluarga selalu saja ada yang bertanya, “Wah, sudah besar ya, sekolah di mana, kelas berapa sekarang, ranking berapa?” Ada rasa minder jika ternyata bersekolah di sekolah yang biasa-biasa saja, apalagi sekolah pinggiran, swasta lagi. Rasa minder pun menjadi-jadi ketika perolehan ranking tidak pada posisi sepuluh besar, apalagi tiga besar. Beruntung sekarang ranking tak lagi diumumkan kepada siswa, namun bukan berarti pertanyaan tentang capaian hasil belajar tak lagi meneror para anak-anak usia sekolah.

Tiap pertengahan tahun jutaan orangtua sibuk memilihkan sekolah terbaik bagi putra-putri mereka. Bagi sebagian orangtua memilih sekolah bukan perkara gampang. Harus disesuaikan dengan isi gocek walau sudah ada program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Seringkali karena berpikir ingin yang terbaik buat anak-anaknya, maka beberapa orangtua menggadaikan barang berharganya, bahkan juga rela berutang untuk membiayai anaknya agar dapat belajar di sekolah unggulan.

Mengapa sampai sedemikian hebatnya sekolah di benak para orangtua? Tiada lain jawabnya kecuali karena sekolah dianggap sebagai institusi sosial yang membuka jalan kesuksesan bagi anak-anak dalam kehidupannya. Sukses dalam hal ini adalah hidup makmur, pekerjaan enak, gaji tinggi, bermartabat dan disegani di mata masyarakat. Hidup makmur dan pekerjaan enak artinya hidup tidak sesusah para orangtua yang harus berpeluh keringat membanting tulang di sawah, kebun, atau lautan. Gaji tinggi artinya hidup sebagai karyawan atau barangkali eksekutif muda di kantor dan digaji bulanan oleh boss. Dan sekolah membekali siswa-siswinya dengan pengetahuan dan keterampilan hidup serta pengakuan formal berupa ijazah yang sekarang masih jadi syarat melamar kerja, terutama di lembaga-lembaga formal.

Barangkali soal imaji hidup sukses itulah motif utama mengapa sekolah jadi sedemikian penting di benak sebagian besar orang. Di sisi lain sekolah sebagai lembaga pendidikan tidaklah netral, sekolah selalu membawa kepentingan ideologis maupun pragmatis tertentu. Henry Giroux (1983: 156-167) misalnya telah menjelaskan bagaimana ideologi bekerja di balik praktik pendidikan persekolahan di Amerika Serikat (A.S.) dalam bentuk kurikulum dan perangkat pembelajaran lainnya. Ia bersama Stanley Aronowitz (1986) juga mengulas berjalannya ideologi pendidikan konservatif, liberal, dan radikal di balik upaya reformasi pendidikan,

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Kritis sebagai bagian dari rangkaian acara Pertemuan Nasional Pendidikan Alternatif pada Jumat, 21 Oktober 2016 di Sanggar Anak Alam (SALAM), Nitiprayan, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Edi Subkhan, dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (UNNES), pengelola Rumah Buku Simpul Semarang (RBSS).

perumusan kurikulum, pendidikan berbasis komputer dan lainnya. Para penulis Indonesia juga telah banyak yang mengulas hal tersebut, antara lain Eko Prasetyo (2009) melalui bukunya “Orang Miskin Dilarang Sekolah”.

Itulah mengapa banyak pihak termasuk negara dan korporasi punya kepentingan besar terhadap pendidikan. Melalui pendidikanlah kepentingan ideologis, politik, kebudayaan, bahkan profit diupayakan untuk tercapai. Pemerintah Indonesia misalnya menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk mendukung agenda-agenda pembangunan, termasuk agenda tetap membangun loyalitas tertinggi pada negara dan bangsa dengan jargon Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Pemerintah yang berkuasa sebagai pemegang amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila kemudian mengupayakannya melalui serangkaian undang-undang/produk hukum yang dapat menjadi penanda dan semacam penjamin diupayakannya beberapa visi berbangsa dan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUD '45 dan Pancasila. Puluhan kebijakan pendidikan dikeluarkan yang dipahami sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut.

Dalam hal ini sekolah selalu menjadi sasaran utama karena bentuknya yang formal dan oleh karenanya relatif mudah untuk dikontrol. Hal tersebut karena jenis pendidikan persekolahan sifatnya memang formal hingga memiliki standar-standar baku yang mudah diidentifikasi dan dilihat. Dalam konteks pendidikan di Indonesia kita mengenal salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang di dalamnya bahkan mengatur dan menstandarkan jenis pendidikan formal dan nonformal. Beberapa standar yang diatur dalam kebijakan tersebut yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi (ruang lingkup materi, bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus), (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Kebijakan tersebut mengatur dengan jelas pengertian/definisi tiap-tiap standar pendidikan dan standar-standar tersebut merupakan acuan minimal dalam mengontrol praksis pendidikan.

Di sisi lain pemerintah pun terlihat lebih banyak memperhatikan jenis pendidikan formal dibanding pendidikan nonformal, apalagi informal. Hal tersebut dapat dilihat dari porsi pembiayaan dan hal-hal yang diatur oleh pemerintah dalam berbagai kebijakannya, mulai dari anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, pengembangan kurikulum nasional, reorientasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pengembangan kualitas guru, hingga revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebagian besar pemberitaan di media massa yang memang banyak dikonsumsi dan memengaruhi publik ketika memberitakan tentang pendidikan maka yang diberitakan sebagian besar juga pendidikan formal. Pemberitaan mengenai jenis-jenis pendidikan alternatif bisa dikatakan proporsinya masih sedikit dan tampak belum dapat membangun kesadaran dari masyarakat bahwa terdapat jalur/jenis pendidikan selain persekolahan yang lebih dapat mengakomodasi kebutuhan individu siswa dan komunitas/masyarakat tertentu.

Akibat dari kondisi tersebut dalam banyak hal orang tua dan anak-anak terjebak keberadaan sekolah. Pada akhirnya dominasi dan hegemoni sistem pendidikan formal persekolahan sekarang menjadikan orang tua dan anak-anak terbatas cara pandangannya mengenai praksis pendidikan. Dalam benak mereka pendidikan adalah sekolah dan sekolah adalah satu-satunya bentuk pendidikan. Hal tersebut masih ditambah dengan gambaran ideal kehidupan modern dan realitas hidup dalam tatanan sosial masyarakat modern yang seakan-akan hanya dapat dicapai melalui jalur sekolah. Dan bukti-bukti telah nyata bahwa orang-orang sukses, para tokoh besar yang sering tampil di media massa, para pemegang kebijakan publik, para eksekutif muda, pekerja kantoran, juga guru dan lainnya adalah lulusan pendidikan formal. Kian gandrunglah masyarakat pada pendidikan formal hingga dalam banyak kasus memaksakan anak-anaknya untuk masuk jalur pendidikan formal dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Tak terbayangkan di angan sebagian besar masyarakat bahwa anak-anak mereka bisa jadi akan dapat belajar dengan baik dan hasilnya optimal pada jenis pendidikan nonformal maupun informal. Sekolah dan kampus masih dipahami sebagai bentuk pendidikan yang paling baik dan unggul dibandingkan lainnya.

### **Ketidakmerdekaan Memilih**

Konsepsi dan praktik pendidikan formal persekolahan pada dasarnya memang relatif kaku dan tidak banyak dapat memberi ruang kebebasan bagi guru dan siswa untuk memilih. Terlebih dalam konteks pendidikan di Indonesia di mana pemerintah masuk lebih dalam sampai pada hal menentukan materi, metode pembelajaran dan juga penilaian hasil belajar siswa. Dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kurikulum sudah disiapkan. Guru tinggal mempersiapkan rencana pembelajaran dan siswa mengikuti pelajaran dengan baik hingga memperoleh nilai hasil belajar. Tak banyak yang dapat dikreasi oleh guru dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah, dan hanya guru-guru yang bervisi progresiflah yang berpotensi mengkaji ulang, mengkritik, dan melakukan kontekstualisasi materi pelajaran. Termasuk juga mengkreasi metode-metode yang lebih mengakomodasi kebutuhan siswa secara kontekstual. Inilah para guru yang disebut oleh Giroux (1985) sebagai guru intelektual transformatif.

Sistem dan kebijakan pendidikan formal yang dikeluarkan oleh pemerintahlah yang menjadi sebab ketiadaan kemerdekaan untuk mengembangkan praksis pembelajaran yang lebih humanis dan mengakomodasi kebutuhan siswa serta lingkungan sekitar. Mata pelajaran yang disusun dalam struktur Kurikulum 2013 misalnya sudah baku dan tidak dapat diubah. Penyusunannya dilakukan oleh tim khusus di bawah komando pemerintah pusat yang pada akhirnya berbuah pada kebijakan implementasi kurikulum secara *top down* yang seringkali menafikan perlunya ruang-ruang dialog yang demokratis untuk membahas substansi kurikulum. Dengan adanya kebijakan dan konsep kurikulum yang bersifat baku dari pemerintah pusat tersebut, maka tak ada pilihan lain bagi siswa terutama kecuali harus mempelajarinya di sekolah. Tidak peduli ia tidak berminat dan tidak pula berbakat dalam mata pelajaran tertentu, tetap ia harus mempelajarinya.

Hal lain adalah mengenai kalender akademik dan penjadwalan proses pembelajaran di sekolah. Dengan mendasarkan pada target-target tertentu, termasuk target harus memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tiap mata pelajaran, yang bagi sekolah-sekolah yang terobsesi untuk menjadi unggulan memiliki target tertentu yang mesti dicapai, maka jadwal pembelajaran disusun sedemikian rupa untuk mengejar target-target tersebut. Pelajaran dimulai kisaran pukul 07.00 WIB (pagi), istirahat pertama, pelajaran berikutnya, istirahat siang, pelajaran lagi dan akhirnya selesai. Bagi sekolah-sekolah tertentu yang sudah “maju” dilanjut dengan program ekstrakurikuler. Dengan jadwal yang begitu padat maka kesempatan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran model proyek sosial, riset lapangan, kunjungan lapangan (*field trip*), hadap masalah (*problem-posing*) dan sejenisnya jadi sulit dilakukan secara optimal dan serius. Semua fokus di kelas dan praktik-praktik tertentu diarahkan untuk dilakukan di kelas.

Di sinilah seakan sekolah sedang mengurung siswa di balik pagar dan dinding sekolah, jauh dari realitas sosial masyarakat yang penuh dengan problem untuk dipecahkan dan dicari solusinya. Melalui perumusan kurikulum termasuk substansi dan arahan metode pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah sejatinya telah terjadi proses penyaringan informasi, pengetahuan, dan keterampilan hidup yang akan dipelajari oleh siswa. Dan penyaringan tersebut dimonopoli oleh pemerintah pusat bersama para akademisi hingga guru-guru di daerah tidak banyak memperoleh akses untuk mendialogkan struktur kurikulum. Pemerintah sudah memiliki asumsi bahwa pengetahuan tertentu dianggap baik pengetahuan lain dianggap belum/tidak perlu dipelajari siswa, termasuk keluasan dan kedalaman materinya juga. Dalam hal ini kebijakan standar isi (lihat lagi PP No. 19 Tahun 2005) menjadi instrumen pokok untuk melegitimasi dan mengatur praktik sensor pengetahuan tersebut.

Guru dan sekolah juga tidak kuasa untuk menolak segala beban kerja dan administrasi yang ditagih dari mereka. Meskipun di lapangan beban kerja minimal 24 jam mengajar dalam 1 (satu) minggu terjadi kegaduhan lantaran saling serobot jam mengajar misalnya, tetap saja guru tak kuasa menolak kebijakan tersebut. Meskipun secara faktual guru bekerja lebih dari 24 jam mengajar dalam satu minggu, antara lain dalam bentuk merencanakan pembelajaran, menyiapkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran, mengembangkan media dan metode pembelajaran, menentukan teknik penilaian hasil belajar, melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), menulis karya tulis ilmiah, dan memperbarui pengetahuan yang mereka ajarkan (*content knowledge*), hal itu tak bisa dijadikan dasar para guru untuk menolak.

Barangkali terlalu banyak produk hukum dan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk dunia pendidikan itulah yang justru menjadi belenggu dan sebab ketidakmerdekaan guru untuk mengembangkan kreativitas mengajar di sekolah. Kiranya dapat dipahami bahwa produk hukum perundang-undangan mengenai pendidikan dikeluarkan dan disahkan sebagai cara untuk menjamin terselenggaranya praktik pendidikan yang baik. Produk hukum tersebut berperan sebagai acuan dasar penyelenggaraan pendidikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta), sekaligus sebagai kontrol mutu minimal pendidikan. Sayangnya keberadaan produk hukum yang mengatur aktivitas guru, kualifikasi guru, hingga jadwal, seragam, dan lainnya tersebut justru menjadikan guru bukan hanya sulit berkreasi, namun

cenderung menjadikan guru dan sekolah tidak kreatif dan minim inovasi. Hal tersebut karena tradisi turun temurun di sekolah bahwa sebuah produk hukum tertentu akan dioperasionalkan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/Juknis). Sebagian besar guru menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis saja, tanpa berpikir perlunya kreativitas dan inovasi mengajar, selain itu juga karena sudah cukup berat beban administratifnya.

Bandungkan dengan konsep dan praktik pendidikan nonformal yang lebih fleksibel dilihat dari sisi hal yang dipelajari, cara dan strategi pembelajarannya, pengelolaannya, dan juga cara penilaian hasil belajarnya. Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, Kalibening, Salatiga, yang digawangi oleh Bahruddin misalnya penyusunan kurikulum dilakukan secara mandiri dan bersama-sama antara anak-anak yang belajar dan pendamping komunitas belajar. Target dan capaian-capaiannya juga dirumuskan bersama secara dialogis dan demokratis serta lebih bersifat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dan konteks sosio-kultural setempat. Bandungkan juga dengan model *home schooling* yang dalam praktik di Indonesia tetap berupaya memberi pelajaran mengacu pada standar isi sekolah-sekolah formal, namun setidaknya cara belajar dan jadwalnya fleksibel. Di India sangat menarik karena munculnya Swaraj University, satu institusi dan gerakan sosial yang mewadahi orang-orang yang ingin belajar. Di situ kurikulum dikembangkan bersama antara guru dan murid serta diarahkan untuk menjadi kurikulum yang melayani kebutuhan personal murid.

### **Problem atau Sekadar Karakteristik Pendidikan Formal?**

Perkembangan jenis pendidikan formal sampai sekarang mengarah pada penguatan karakter menjadi institusi pendidikan yang berorientasi akademik. Perkecualiannya adalah pada jenis sekolah-sekolah vokasi/kejuruan dari jenjang SMK hingga perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan kurikulum berupa mata pelajaran (*subject matter*) di mana tiap mata pelajaran berakar pada bidang keilmuan tertentu. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Inggris misalnya masuk dalam bidang keilmuan bahasa atau linguistik, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) akarnya adalah bidang keilmuan biologi, kimia, dan fisika, lainnya misalnya adalah matematika, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan olah raga. Perkecualiannya adalah di sekolah kejuruan yang walaupun pengetahuan dan keterampilan hidup diberikan dalam bentuk mata pelajaran, namun orientasinya ditekankan pada praktik dan penguasaan kompetensi praktis, bukan teoretis.

Ciri lain untuk dapat membedakan antara orientasi akademik dan nonakademik dapat dilihat dari substansi/materi yang dipelajari yang berkarakter teoretis atau praktik. Olah raga misalnya jika berat pada teori maka masuk kategori akademik, namun jika berat pada praktik maka masuk kategori nonakademik. Demikian pula dengan sastra, seni, dan budaya,.

Karakteristik akademik pada sekolah-sekolah formal jelas baik dan jadi lahan subur bagi perkembangan intelektual dari siswa-siswi yang memiliki potensi akademik tinggi dibandingkan dengan siswa-siswi yang potensinya nonakademik. Dominasi orientasi akademik dapat dilihat juga dari bagaimana struktur kurikulum pendidikan

formal secara seragam dan sentralistis menempatkan olah raga, seni, sastra, dan hal-hal yang bernuansa budaya. Selain proporsinya sedikit, sebagian lagi diperbolehkan untuk diganti atau ditiadakan jika terdapat kepentingan yang dianggap lebih penting untuk dipelajari. Misalnya dalam menyongsong Ujian Nasional (UN) banyak sekolah jenjang SMA berinisiatif untuk meniadakan mata pelajaran olah raga, seni, dan sastra, diganti dengan pelatihan praktis (*drill & practice*) mengerjakan soal-soal UN.

Hal ini berjaln kelindan dengan stigma bahwa cerdas, pintar, dan berprestasi itu diukur dari capaian akademik, bukan nonakademik. Anak yang berbakat dan minat dalam bidang olah raga, seni, budaya, dan sastra hingga mampu berkreasi, berkarya, dan berprestasi dalam bidang-bidang tersebut biasanya tidak dianggap lebih berprestasi dibanding anak-anak lain yang jadi juara olimpiade fisika, kimia, dan matematika. Jika kita mengacu pada upaya untuk melayani tumbuh kembang siswa, serta upaya membimbing perkembangan potensi siswa secara optimal, maka tentu akan lebih baik jika siswa dibimbing dan difasilitasi serta diakomodasi mengacu pada potensi dan kemampuan terbaiknya. Seorang siswa yang brilian bersastra ria namun jeblok di matematika jangan terlalu diforsir dan ditekan untuk juga berprestasi dalam bidang matematika, sebaliknya ia mesti dibimbing dan difasilitasi agar potensi dan kemampuan terbaiknya dalam sastra dapat optimal, sementara itu matematika cukup sampai pada hal-hal dasar saja.

Peminggiran mata pelajaran yang kuat karakter akademiknya juga terlihat dalam argumentasi keberadaan beberapa mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Mata pelajaran yang diujikan dalam UN dipahami sebagai indikator kualitas siswa dan prasyarat hidup sukses untuk bekerja dan studi lanjut. Buah dari argumentasi ini adalah rasa hanya dipandang sebelah mata pada guru-guru mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan, Olah Raga, dan sejenisnya. Sampai sekarang pada jenjang SMA, sains, penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), masih dipandang sebagai penanda siswa-siswinya lebih cerdas, pintar, dan brilian dibanding siswa-siswi yang masuk penjurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Rasa inferior bisa tumbuh pada diri anak-anak penjurusan IPS dan juga Bahasa, selain itu cara pandang yang bias ini jelas bertentangan dengan konsep pendidikan yang mesti melayani siswa sesuai dengan minat dan potensi serta kemampuan terbaiknya.

Pola pikir dan pendidikan yang memaksa dan memberi standar berkualitas dengan berpatokan pada IPA, IPS, Bahasa, mengarahkan pada kecenderungan untuk berpola pikir demikian hingga memaksa masuk ke penjurusan IPA, padahal hatinya tidak di situ. Anak-anak menjadi tak lagi merdeka dalam memilih penjurusan karena dibelenggu oleh cara pandang bias terhadap hakikat kualitas, prestasi, kecerdasan, dan sejenisnya tadi.

## **Mengakui Keragaman Jenis Pendidikan**

Problem sebenarnya muncul ketika masyarakat, termasuk orang tua dan siswa tidak mau tahu dan tidak sadar diri terhadap kemampuan, bakat, dan minat anak. Semua didesakkan untuk masuk jalur pendidikan formal dengan dalih itulah jalan terbaik untuk hidup sukses dan bahagia. Di dalam sekolah pun anak diarahkan semua

untuk berprestasi dalam bidang sains/eksakta sebagai penanda kecerdasan dan prestasi. Hal ini terjadi juga di perguruan tinggi, pengalaman saya dalam mengajar mahasiswa misalnya menemukan mahasiswa yang motivasi kuliahnya rendah, tidak berminat membaca, apalagi belajar menulis, tidak suka mengembangkan nalar kritis dengan diskusi. Maunya persis seperti anak-anak SMA yang konvensional, yakni seakan sekadar ingin diberi materi, diberi ceramah, diberi tugas, mendapat nilai, dan akhirnya Indeks Prestasi (IP) bagus, selesai.

Ada pula mahasiswa yang lemah ketika di kelas, tak mampu memahami materi dengan baik, lamban merespons ketika diskusi, tak suka baca buku dan menulis, namun punya hobi olah raga, ikut Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) keolahragaan dan mencetak prestasi. Artinya mereka sebenarnya memaksakan diri masuk dalam jalur formal pendidikan tinggi berjenis universitas namun sejatinya minat dan potensi terbaiknya bukan di situ. Di sinilah jenis-jenis pendidikan alternatif menjadi jalan lain yang sangat menjanjikan sebagai sebuah gagasan dan gerakan pendidikan yang betul-betul berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan belajar subjek didik dan masyarakat. Sayangnya belum banyak orang mengetahui dan sadar mengenai pendidikan alternatif. Termasuk juga sebagian masyarakat masih merasa gengsi ketika tidak bersekolah formal dan tidak berkuliah.

Jenis pendidikan alternatif seperti sanggar, komunitas belajar, pesantren, *home schooling*, dan lainnya masih dianggap sebagai jenis pendidikan nomor sekian ketika tidak dapat bersekolah karena kendala biaya, waktu, dan jarak geografis. Belum banyak yang paham dan menyadari bahwa justru potensi menjadi penggerak perubahan sosial, pemberdayaan komunitas/masyarakat, produksi ilmu pengetahuan yang menautkan antara teori dan praktik (*praxis*) justru lebih potensial terbangun di luar lingkungan pendidikan persekolahan/formal. Inilah pekerjaan rumah (PR) berat yang dihadapi oleh para pegiat pendidikan, terutama pendidikan alternatif sekarang ini. Namun bukan berarti upaya untuk mengembangkan dan menggerakkan jenis pendidikan dan/atau pedagogi yang memerdekakan siswa hanya bisa dilakukan di luar sistem persekolahan; di dalam sistem pun asalnya gurunya berkarakter intelektual transformatif dan lingkungan sekolah termasuk level manajerialnya mendukung rasanya bisa saja di dalam sistem pendidikan yang memerdekakan disemai.

## REFERENSI

Aronowitz, S. & Giroux, H. (1986). *Education Under Siege: the Conservative, Liberal, and Radical over Schooling*. London: Routledge & Kegan Paul.

Giroux, H. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy fo the Opposition*. Massachusetts: Bergin & Garvey Publisher, Inc.

Giroux, H. (1985). Teacher as Transformative Intellectuals. *Social Education*. 49(5), pp. 376-379.

Prasetyo, E. (2009). *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book.